

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ISR
(*ISLAMIC SOCIAL REPORTING*) PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Gearika Elendri

No. Mahasiswa: 12312162

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KINERJA
KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ISR (ISLAMIC SOCIAL
REPORTING) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Gearika Elendri

No. Mahasiswa: 12312162

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 15 Desember 2016

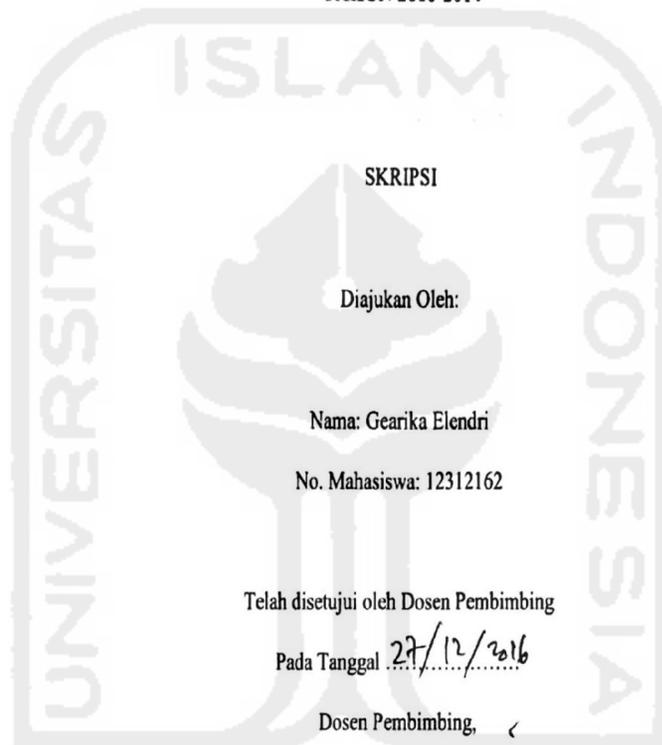
Penulis,



(Gearika Elendri)

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA
KEUANGAN TERHADAP ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

TAHUN 2010-2014



SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Gearika Elendri

No. Mahasiswa: 12312162

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 27/12/2016

Dosen Pembimbing, <


Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN
TERHADAP PENGUNGKAPAN ISR (ISLAMIC SOCIAL REPORTING) PADA BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Disusun Oleh : **GEARIKA ELENDRI**

Nomor Mahasiswa : **12312162**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 26 Januari 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, SE., SH.,M.Sc. SAS.

Penguji : Arif Rahman, SIP., SE., M.Com.,Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

A handwritten signature in black ink, located to the right of the text for the examiners.

MOTTO

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah: 216)

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap.

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

"Belajar dari masa lalu, hidup untuk masa kini, dan berharap untuk masa yang akan datang".

(Albert Einstein)

"Kesuksesan adalah perjalanan dari satu kegagalan kepada kegagalan yang lain tanpa kehilangan antusiasme.".

(Winston Churchill)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin

Puji dan syukur kepada Allah SWT

Atas Rahmat dan Karunia-Nya

Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW

Saya persembahkan untuk

Bapak, Ibu, dan Adik-adikku

Sahabat dan teman-temanku

dan Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.,

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW serta para sahabatnya dan keluarganya yang semoga ditinggikan derajatnya di sisi Allah SWT. Amin.

Alhamdulillah, penelitian yang berjudul “PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ISR (ISLAMIC SOCIAL REPORTING) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA” telah dapat penulis selesaikan dengan segenap kemampuan penulis. Penelitian dalam bentuk skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII).

Penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan, motivasi, dan do’a dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ir. Hendri Arianto dan Ibu Elena Syachnas, SE yang telah memberikan doa, kasih sayang, nasehat, dan dukungan yang luar biasa kepada penulis.
2. Saudara-saudaraku tercinta, Billiansyah Elendri dan M. Novento Elendri yang telah mendoakan dan mendukung penulis.
3. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Drs. Dwi Praptono Agus Harjito, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dekar Urumsah, Drs., S.Si, MCom(IS), PhD selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu bagi penulis untuk membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis dengan sabar dan tekun.
7. Segenap dosen dan staff akademik Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta bantuan kepada penulis.
8. Sahabatku, Putri Mardiyah, Meilisa Marin, Tia Meythafani, Listiyorini, Meigie Auriska, Ricky Setya Anggara, Andin S Rheza, Ragil Hapsoro Mufti, Nadia Rafiana, Nisrina Nur Apriliani, Athifa Fajri, Fatimah Dwinovianti, Samiyah Afiff, Vivie Yulita Kurniasari, Eugenie Vina yang telah memberikan dukungan dan menghibur penulis ketika mengerjakan skripsi ini.

9. Teman-temanku lainnya, baik teman SMA, teman KKN, Kontrakan Sweety, teman satu bimbingan skripsi, dan teman angkatan 2012 akuntansi FE UII yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
10. Semua pihak yang terkait dan membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun cara menyajikan. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan kemampuan dan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan dan semoga Allah SWT menilai usaha penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai ibadah yang diridhoi-Nya. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2016

Penulis,

Gearika Elendri

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Berita Acara	iv
Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13

2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	13
2.1.2 Teori Legitimasi	14
2.1.3 Teori Stakeholder	15
2.1.4 Perbankan Syariah	18
2.1.4.1 Peran dan Fungsi Bank Syariah	19
2.1.4.2 Produk dan Jasa Bank Syariah	19
2.1.4.3 Laporan Keuangan Bank Syariah	25
2.1.5 <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	27
2.1.5.1 Dewan Pengawas Syariah	29
2.1.5.2 Dewan Komisaris	31
2.1.5.3 Komite Audit	32
2.1.5.4 Kepemilikan Institusional	33
2.1.6 Kinerja Keuangan	34
2.1.6.1 Rasio Profitabilitas	36
2.1.6.2 Rasio Likuiditas	37
2.1.6.3 Rasio solvabilitas	38
2.1.7 Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	38
2.1.7.1 Pengungkapan	38
2.1.7.2 <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	40

2.2 Penelitian Terdahulu	44
2.3 Kerangka Penelitian	47
2.4 Hipotesis Penelitian	48
2.4.1 Jumlah Dewan Pengawas Syariah	48
2.4.2 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	49
2.4.3 Jumlah Komite Audit	50
2.4.4 Kepemilikan Institusional	50
2.4.5 Profitabilitas	51
2.4.6 Likuiditas	52
2.4.7 Solvabilitas	53
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Populasi dan Penentuan Sampel	55
3.2 Jenis dan Sumber Data	56
3.3 Metode Pengumpulan Data	57
3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel	57
3.4.1 Variabel Bebas (Independen)	58
3.4.1.1 <i>Good Corporate Governance</i>	58
3.4.1.2 Kinerja Keuangan	60

3.4.2 Variabel Terikat (Dependen)	61
3.4.2.1 <i>Islamic Social Reporting</i>	61
3.5 Metode Analisis Data	62
3.5.1 Uji Asumsi Klasik	62
3.5.1.1 Uji Normalitas	62
3.5.1.2 Uji Multikolinearitas	63
3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas	64
3.5.1.4 Uji Autokorelasi	65
3.5.2 Uji Hipotesis	66
3.5.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda	66
3.5.2.2 Uji t.....	67
3.5.2.3 Uji f	67
3.5.2.4 Uji Adjusted R Squared (Adj.R2)	68
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	69
4.1 Analisis Deskriptif	69
4.2 Analisis Statistik	71
4.2.1 Uji Asumsi Klasik	71
4.2.1.1 Uji Normalitas	71

4.2.1.2 Uji Multikolinearitas	73
4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas	74
4.2.1.4 Uji Autokorelasi	75
4.2.2 Analisis Data	76
4.2.2.1 Analisis Regresi Berganda	76
4.2.2.2 Uji Signifikan Parsial (Uji t)	77
4.2.2.3 Uji Signifikan Parsial (Uji f).....	80
4.2.2.4 Koefisien Determinasi ganda (adjusted R ²)	81
4.3 Hasil Uji Hipotesis	82
4.4 Pembahasan	85
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	88
5.1 Simpulan	88
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

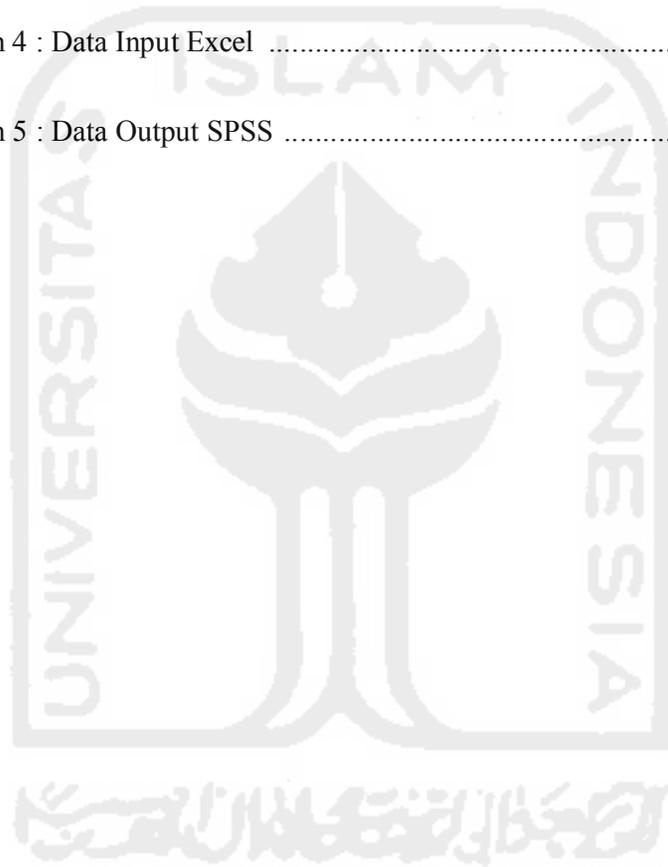
1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah	2
2.1 Penelitian Terdahulu	44
4.1 Rincian Jumlah Sampel Penelitian	69
4.2 Statistik Deskriptif	70
4.3 Hasil Pengujian Multikolinearitas	73
4.4 Hasil Pengujian Autokorelasi	75
4.5 Hasil Analisis Regresi Berganda	76
4.6 Hasil Uji f	80
4.7 Hasil Koefisien Determinasi Ganda (R^2)	81

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran	47
4.2 Uji Normalitas	72
4.3 Uji Heteroskedastisitas	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Indeks <i>Islamic Social Reporting</i>	96
Lampiran 2 : Populasi dan Sampel Penelitian	98
Lampiran 3 : Hasil <i>Checklist</i> Indeks <i>Islamic Social Reporting</i>	100
Lampiran 4 : Data Input Excel	103
Lampiran 5 : Data Output SPSS	106



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan Kinerja Keuangan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Elemen GCG dalam penelitian ini yaitu jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, dan kepemilikan institusional. Elemen Kinerja Keuangan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010 hingga 2014. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan terdapat 9 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Metode analisis penelitian ini adalah regresi sederhana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sedangkan frekuensi rapat dewan komisaris, kepemilikan institusional, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Kata kunci : *Islamic Social Reporting, dewan pengawas syariah, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat yaitu adalah dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Perbankan syariah mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan sebagai pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Beroperasinya Bank Muamalat Indonesia tersebut didukung dengan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang beberapa pasalnya mengatur tentang perbankan islam di Indonesia, meskipun dalam undang-undang tersebut tidak menyebut dan menjelaskan secara langsung bank islam itu sendiri.

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang perbankan no. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU No.7 tahun 1992 tersebut mengatur

dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Menurut statistik perbankan syariah tahun 2016 jumlah Bank Umum Syariah mengalami peningkatan, saat ini terdapat 12 Bank Umum Syariah di Indonesia, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah – Maret 2016

Kelompok Bank	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Maret 2016
Bank Umum Syariah							
1. Jumlah Bank	11	11	11	11	12	12	12
2. Jumlah Kantor	1215	1401	1745	1998	2163	1990	1918
Jumlah Bank Umum Konvensional	23	24	24	23	22	22	22
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah							
1. Jumlah Bank	150	155	158	163	161	163	165
2. Jumlah Kantor	286	364	401	399	439	446	454

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2016

Dengan berkembangnya bank syariah yang berjalan dengan prinsip islam, maka bank syariah dituntut untuk benar-benar mengedepankan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, sehingga tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan hal yang harus diperhatikan. Pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai *Corporate Social responsibility* (CSR) khususnya untuk perbankan syariah. Regulasi tersebut Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, pada bab II pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pada pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selanjutnya ayat (2) dijelaskan bahwa bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Kemudian ayat (3) disebutkan bahwa bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Informasi yang seringkali diminta untuk diungkapkan oleh perusahaan adalah mengenai tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Informasi adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi *stakeholders* untuk mengambil keputusan. Penyampaian informasi melalui laporan keuangan perlu dilakukan agar pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang penting mengenai kondisi ekonomi perusahaan yang berguna untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu memudahkan investor untuk mengambil keputusan yang diharapkan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan investor tersebut.

Hadi (2011:65) mengemukakan bahwa *Social responsibility* dengan perjalanan waktu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan perusahaan. Hal itu karena keberadaan perusahaan di tengah lingkungan memiliki dampak positif maupun negatif. Khususnya dampak negatif (negative externalities) memicu reaksi dan protes *stakeholder*, sehingga perlu penyeimbangan lewat peran *social responsibility* sebagai salah satu strategi legitimasi perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan manfaat tersendiri dengan melakukan praktik pengungkapan CSR. Secara tidak langsung CSR dapat menjadi media promosi bagi perusahaan untuk memperkuat citra positifnya kepada masyarakat. Hadi (2011:156) menyatakan bahwa perusahaan akan mendapatkan sejumlah keuntungan dengan melakukan pengungkapan atas biaya sosial yang telah dikeluarkan perusahaan, antara lain: (1) menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar; (2) transparansi; (3) wujud *social responsibility*; (4) membangun image perusahaan; (5) membangun image terhadap mutual fund dan shareholder; (6) mendukung tingkat kembalian investasi; (7) membangun image terhadap investor supaya investasi saham lebih aman.

Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah, peneliti-peneliti ekonomi syariah saat ini banyak yang menggunakan *Islamic Social Reporting Index (ISR)* untuk mengukur CSR institusi keuangan syariah. Indeks ISR diyakini dapat menjadi

ijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam.

Praktik dan pengungkapan ISR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Good Corporate Governance* (GCG), yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholders* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan.

Peningkatan jumlah anggota dewan pengawas syariah mungkin mengarah ke tingkat pengungkapan ISR yang lebih tinggi dalam peningkatan pemantauan. AAOIFI menyatakan bahwa diperlukan setidaknya tiga anggota DPS. Ini merupakan persyaratan umum di banyak bank syariah. Semakin besar jumlah anggota DPS maka semakin besar pemantauan terhadap hukum dan prinsip-prinsip Islam. Dengan jumlah DPS yang memadai maka pelaksanaan dan pengungkapan ISR menjadi lebih terkontrol.

Dewan komisaris bertugas menyampaikan semua informasi kepada *stakeholders*, termasuk informasi pengungkapan tanggung jawab sosial selain itu dewan komisaris juga memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris mengadakan rapat-rapat rutin untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dewan direksi. Hal ini

mengakibatkan efektivitas pengawasan sehingga kinerja perusahaan akan semakin bagus.

Jumlah komite audit yang lebih besar diharapkan dapat menjaga kinerja perusahaan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah komite audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin efektif. Semakin besar jumlah komite audit maka kinerja perusahaan akan semakin bagus dan pengungkapan kinerja sosial (tanggung jawab sosial) perusahaan semakin luas.

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh suatu institusi dalam perusahaan. Adanya pemegang saham seperti kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Keberadaan kepemilikan institusional dianggap mampu melakukan pengawasan yang efektif dalam setiap pengambilan keputusan oleh manajer.

Selain *Good Corporate Governance*, kinerja keuangan juga perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengungkapan *islamic social reporting*. Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan

sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Untuk membuat keputusan rasional yang sesuai dengan tujuan bank, manajerial bank haruslah mempunyai alat-alat analisa tertentu. Analisa keuangan dilakukan baik oleh pihak luar bank, seperti kreditur, investor, nasabah, dan Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawas perbankan, maupun pihak bank sendiri. Jenis analisa bervariasi tergantung pada kepentingan pihak-pihak yang melakukan analisa. Seorang yang memberikan kredit (pinjaman) jangka pendek dan nasabah tabungan, akan tertarik pada likuiditas bank. Yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi (jangka pendek). Sedangkan para pemegang saham dan nasabah deposito, mungkin akan tertarik pada rasio profitabilitas bank, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh laba. Para pemegang surat berharga bank, seperti pemegang obligasi, dan para pemberi kredit jangka panjang, mungkin akan tertarik pada struktur modal perusahaan, sumber-sumber dana dan penggunaan dan, profitabilitas selama beberapa periode dan proyeksi profitabilitas di masa datang, serta rasio solvabilitas bank, yaitu kemampuan bank dalam membayar hutang-hutang jangka panjang atau kemampuan bank dalam melunasi

semua hutangnya apabila dilikuidasi. Bagi Bank Indonesia selaku Pembina dan Pengawas Perbankan di Indonesia, mungkin akan tertarik pada rasio kecukupan modal bank, rasio kualitas aktiva produktif, rasio-rasio profitabilitas bank, dan rasio-rasio likuiditas bank.

Dengan menggunakan analisa rasio dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat kinerja keuangan suatu bank dan kesehatannya dengan menggunakan perhitungan rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas suatu bank. Perhitungan rasio untuk menilai posisi kinerja suatu bank, akan memberikan gambaran yang jelas tentang baik atau tidaknya operasional suatu bank, yang dilihat dari posisi keuangannya dalam neraca dan laba-rugi.

Atas dasar uraian diatas, peneliti mengambil penelitian dengan judul :

“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Syariah di Indonesia?

2. Apakah frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Syariah di Indonesia?
3. Apakah jumlah anggota Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Syariah di Indonesia?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Syariah di Indonesia?
5. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Syariah di Indonesia?
6. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Syariah di Indonesia?
7. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Syariah Indonesia.

2. Mengetahui pengaruh frekuensi rapat Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Syariah Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh jumlah anggota Komite Audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Syariah Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Syariah Indonesia.
5. Mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perbankan syariah Indonesia.
6. Mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perbankan syariah Indonesia.
7. Mengetahui pengaruh Solvabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perbankan syariah Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi yang berhubungan dengan materi *Islamic Social Reporting* (ISR) dan

menambah pengetahuan mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) sehingga dapat menambah kajian ilmu akuntansi yang berkaitan dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

2. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan dapat memberikan masukan serta informasi yang sesuai dengan kebutuhan bagi perusahaan dalam hal pengungkapan laporan tahunan.

3. Bagi investor/calon investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan tahunan sehingga dijadikan acuan untuk pembuatan keputusan investasi.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini disajikan dalam lima bab, dimana setiap bab akan disusun secara sistematis sehingga akan menghubungkan antara satu bab dengan bab lainnya, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian kajian pustaka penulis menguraikandasar-dasar teori yang didapat dari literatur-literatur serta bahasan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis. Dalam bab ini juga menguraikanhipotesis dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas gambaran tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Oleh karena itu diuraikan metode penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan.

BAB IV ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan dan menganalisis hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agency

Teori Keagenan menjelaskan adanya kontrak antara agent (manajemen) dan principal (pemegang saham) yang mana agen menerima mandat untuk mengelola perusahaan dari principal (Jensen dan Mekling, 1976). Dalam teori ini diasumsikan bahwa dimungkinkan manajemen akan berperilaku oportunistik untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan manajemen laba. Tindakan manajerial ini dapat menyesatkan dan dapat menyebabkan pihak outsider membuat keputusan ekonomi yang salah (Zahra et al., 2005).

Dalam teori keagenan (agency theory), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (prinsipal) memperkerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (asymmetrical information) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat. Legitimasi juga dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan.

Menurut Dowling dan Pfeffer dalam Ghazali dan Chairiri 2007, legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Perusahaan dapat melakukan investasi lingkungan sebagai salah satu bentuk perhatian masyarakat terhadap lingkungan dan masyarakat. Ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, maka perusahaan akan berada pada posisi terancam. Perbedaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Perusahaan harus memantau dan mengevaluasi ketika menemukan kemungkinan hal tersebut terjadi.

Pengungkapan sosial dibutuhkan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini berhubungan dengan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-

prinsip islam. Bentuk kepatuhan tersebut adalah melaksanakan pengungkapan ISR dalam laporan tahunannya, dengan harapan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat sehingga perbankan syariah dapat terus bertahan.

2.1.3 Teori *Stakeholder*

Menurut Ghazali dan Chariri (2007), Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut.

Rhenald Kasali (Wibisono, 2007) membagi *stakeholders* menjadi sebagai berikut:

- *Stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal

Stakeholders internal adalah *stakeholders* yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (shareholder). Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang berada di luar lingkungan organisasi seperti

penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok tanggung jawab social investor, licensing partner dan lain-lain.

- *Stakeholders* primer, sekunder dan marjinal

Tidak semua elemen dalam *stakeholder* perlu diperhatikan. Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. *Stakeholders* yang paling penting disebut *stakeholders* primer, *stakeholders* yang kurang penting *stakeholders* sekunder dan yang bisa diabaikan disebut *stakeholder* marjinal. Urutan prioritas ini berbeda bagi setiap perusahaan meskipun produk atau jasanya sama. Urutan ini juga bisa berubah dari waktu ke waktu.

- *Stakeholders* tradisional dan *stakeholders* masa depan

Karyawan dan konsumen dapat disebut *stakeholders* tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan *stakeholders* masa depan adalah *stakeholders* pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial.

- Proponents, opponents, dan uncommitted

Di antara *stakeholders* terdapat kelompok yang peduli organisasi (proponents), menentang organisasi (opponents) dan ada yang tidak peduli atau diabaikan (uncommitted). Organisasi perlu mengenal *stakeholders* yang berbeda-beda ini agar dapat melihat

permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proposional.

- Silent majority dan vocal minority

Dilihat dari aktivitas *stakeholders* dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan pertentangan atau dukungan secara vocal (aktif) namun ada pula yang mendukung secara silent (pasif).

Teori *stakeholders* merupakan salah satu teori yang mendasari pengungkapan sosial. Teori *stakeholders* dapat mendeskripsikan faktor *Islamic Social Reporting* (ISR) dalam penelitian ini. Teori *stakeholders* menyatakan bahwa operasi perusahaan tidak hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, tetapi juga untuk kepentingan pihak lain seperti *stakeholders* dan masyarakat. Diharapkan melalui teori *stakeholders* ini, pihak manajemen perusahaan akan memasukkan nilai-nilai moralitas dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas usahanya.

Dalam penelitian ini, Teori *Stakeholder* juga diterapkan pada variabel profitabilitas. variabel ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab pada para pemegang kepentingan.

2.1.4 Perbankan Syariah

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syaria'ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Pada tahun 1992 perbankan syariah mulai berdiri di Indonesia yaitu Bank Muamalat. Kemudian disusul dengan Asuransi Syariah TAKAFUL yang didirikan tahun 1994. Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 pada pasal 1 ayat (1) bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kata bank dalam bahasa Prancis adalah *banque* dan dalam bahasa Italia adalah *banco*, yang berarti peti, lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam Alquran, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 pada pasal 1 ayat (7) bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.4.1 Peran dan Fungsi Bank Syariah

Adapun peran dan fungsi Bank Syariah yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), sebagai berikut:

1. Manajer investasi, perbankan Islam dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, perbankan Islam dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, perbankan Islam dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Perbankan Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.1.4.2 Produk dan Jasa Bank Syariah

Secara garis besar produk dan jasa perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga yaitu : produk penghimpunan dana (*funding*), produk pembiayaan dana (*lending*), dan produk jasa (*service*).

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Penghimpunan dana di bank syariah yakni berupa giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan prinsip yang diterapkan yaitu prinsip wadiah dan mudharabah.

- a. Wadiah merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki. Wadiah terdiri dari dua jenis yaitu Yad al amanah dan Yad adh-dhamanah. Prinsip wadiah yang diterapkan pada bank syariah adalah wadiah yad adh-dhamanah. Prinsip wadiah yad adh-dhamanah ini diterapkan pada produk rekening giro.
- b. Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) dimana pemilik modal sepenuhnya menanggung modal usaha dan pengelola modal sepenuhnya mengelola dana dengan porsi bagi hasil yang disepakati pada awal akad. Terdapat dua jenis mudharabah yaitu : mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Dalam mudharabah muqayyadah pihak pemilik modal memberikan

batasan dalam menggunakan dana sedangkan mudharabah mutlaqah tidak memberikan batasan kepada pengelola modal dalam menginvestasikan dananya.

2. Pembiayaan dana (*lending*)

Secara garis besar produk pembiayaan dana terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, sebagai berikut :

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip ini dilakukan oleh perbankan syariah dan LKMS diimplementasikan ke dalam tiga bentuk pembiayaan yaitu :

- ❖ Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah. Dalam praktiknya, murabahah sering digunakan untuk pembelian barang-barang konsumtif seperti alat-alat rumah tangga, barang elektronik dan kendaraan bermotor.
- ❖ Salam adalah pembelian barang dengan model pesanan dimana pada perjanjian di

awal telah disepakati barang yang dipesan beserta karakteristik dan sifat-sifatnya.

- ❖ Istishna adalah proses jual beli barang dengan model pesanan seperti konsep salam, namun memiliki kekhususan yaitu jika terjadi perubahan harga dari criteria barang yang dipesan setelah perjanjian ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh pembeli atau nasabah.

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah) adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (syirkah) diimplementasikan ke dalam dua bentuk pembiayaan, yaitu :

- ❖ Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) dimana pemilik modal sepenuhnya menanggung modal

usaha dan pengelola modal sepenuhnya mengelola dana dengan porsi bagi hasil yang disepakati pada awal akad.

- ❖ Musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha antara bank dengan beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan meakukan usaha bersama dalam kemitraan. Pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai kontribusi modal.

3. Produk Jasa (*service*)

- a. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharap imbalan.
- b. Hawalah adalah akad pemindahan hutang piutang suatu pihak kepada pihak lain. Tidak diperbolehkan pemngambilan manfaat atas pengalihan hutang piutang tersebut. Bank hanya

diperbolehkan menerima fee atas jasa penagihan.

- c. Wakalah adalah Akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam perbankan Wakalah digunakan untuk penerbitan Letter of Credit (L/C impor) atau penerusan permintaan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor).
- d. Sharf adalah transaksi pertukaran emas dan perak, atau pertukaran valuta asing.
- e. Rahn adalah menyimpan sementara harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman. Harta yang disimpan sementara dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.
- f. Kafalah adalah Akad jaminan dari suatu pihak kepada pihak lain.

2.1.4.3 Laporan Keuangan Bank Syariah

Penyajian laporan akuntansi bank syariah telah di atur dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Oleh karena itu, laporan keuangan harus mampu memfasilitasi semua pihak yang terkait dengan bank syariah. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah dan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah meliputi : (a) aset, (b) Kewajiban, (c) Dana syirkah temporer, (d) Ekuitas, (e) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, (f) Arus kas, (g) Dana zakat, (h) Dana kebajikan.

Paragraf 11 PSAK 101 mengatur tentang komponen-komponen laporan keuangan entitas syariah yang wajib disajikan sebagai standar penyajian antara lain :

a. Neraca

Dengan neraca, pemakai laporan keuangan akan dapat menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan, menilai struktur pendanaan perusahaan, menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan, serta mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan ini memberikan informasi tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan.

c. Laporan Arus Kas

Laporan ini memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini merupakan penghubung antara laporan laba rugi dan neraca.

e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Laporan ini merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas syariah sebagai pelaksana fungsi Baitul Maal.

f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan ini berisi informasi penerimaan dana kebajikan dari beberapa komponen yang diterima oleh entitas syariah seperti infaq, shodaqoh, hasil pengelolaan dana wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan lain-lain.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis setiap pos Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.5 *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Dalam penjelasan umum Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dikemukakan mengenai arti dari setiap prinsip GCG tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Transparansi (*transparancy*) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stake holder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu khusus dalam perbankan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*).

Menurut Ningrum (2013), Mekanisme dan struktur governance di perusahaan dapat dijadikan infrastruktur pendukung praktek dan pengungkapan CSR di Indonesia. Struktur governance yang berlandaskan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) akan mendorong kegiatan CSR dan pelaporannya. Jika struktur governance yang dipresentasikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional mengutamakan kepentingan perusahaan (sesuai dengan teori *stakeholders*), maka kegiatan dan pelaporan CSR seharusnya berjalan dengan baik di perusahaan tersebut. Jadi, untuk melaksanakan CSR dengan baik perusahaan harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

2.1.5.1. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah sehingga anggota DPS harus terdiri dari para pakar dibidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. DPS merupakan komponen yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang dijalankan sesuai syariah Islam. Laporan DPS dibuat untuk meyakinkan *stakeholder* bahwa perusahaan telah menjalankan aktivitas operasinya sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Menurut Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001 fungsi Dewan Pengawas Syariah meliputi : (1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. (2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. (3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. (4) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

Berdasarkan uraian fungsi DPS di atas maka dapat dikatakan bahwa DPS mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan. Selain itu terdapat dana kebajikan (qard) yang dapat dikategorikan sebagai ISR dan DPS memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan ini.

2.1.5.2 Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Wewenang dewan komisaris adalah untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelola perusahaan. Dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan wewenang tersebut.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi.

3. Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BUS.
4. Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada direksi sepanjang kewenangan dewan komisaris tersebut yang ditetapkan dalam anggaran dasar BUS atau dalam rapat umum pemegang saham.

2.1.5.3 Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat.

Bank harus memastikan bahwa fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan dengan baik. Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, harus memiliki Komite Audit sedangkan untuk bank lain disesuaikan dengan kebutuhan. Hal-hal yang memerlukan perhatian dalam hubungan dengan Komite Audit adalah :

- a. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan anggotanya terdiri dari Komisaris serta pihak luar yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan.
- b. Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa :
 - Struktur pengendalian internal bank telah cukup untuk menjaga agar manajemen siap menjalankan praktek perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 - Pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku.
 - Tindak lanjut temuan hasil audit telah dilaksanakan oleh manajemen dengan baik.
- c. Komite Audit harus menjalankan tugasnya berdasarkan tata tertib dan prosedur operasional baku yang ditentukan bersama dengan Dewan Komisaris.

2.1.5.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi

luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. Kepemilikan institusional diukur dengan jumlah lembar saham milik institusi dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar dalam perusahaan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan.

Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat (Muttaqin, 2013).

2.1.6 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan

benar. Kinerja (*performance*) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan.

Pengertian kinerja menurut Indra Bastian (2006:274) adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Konsep kinerja keuangan menurut Indriyo Gitosudarmo dan Basri (2002:275) adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca.

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Tingkat kinerja suatu bank dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan yaitu rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Rasio keuangan tersebut dapat menggambarkan sehat tidaknya

operasional suatu bank, yang dapat ditinjau dari laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi.

2.1.6.1 Rasio Profitabilitas

Profitabilitas merupakan aktivitas yang membuat manajemen menjadi lebih bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada pemegang saham (Heinze (dalam Rosmasita, 2007)).

Perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan identik dengan upaya-upaya untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Luasnya pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan adalah upaya untuk memperoleh dukungan dan mencari simpati para *stakeholder*-nya. Perusahaan dengan kinerja yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan dalam proses pembentukan image yang sangat berpengaruh untuk mendapat kepercayaan dari para *stakeholder*. Nisrina Widayuni (2014) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *Corporate Social responsibility*.

Rasio Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

2.1.6.2 Rasio Likuiditas

Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya atau kewajiban yang telah jatuh tempo.

Rasio likuiditas yang digunakan pada penelitian ini yaitu Financing to Deposit Ratio (FDR), menurut kamus BI, FDR adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, FDR dapat menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan.

Dari sisi kesehatan bank, tingginya rasio likuiditas akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan bank. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat pengungkapan karena perusahaan dengan kondisi keuangan yang kuat akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar untuk menunjukkan kredibilitas perusahaannya daripada perusahaan dengan kondisi keuangan yang lemah. Sedangkan pada sisi yang lain, jika likuiditas diukur sebagai kinerja, perusahaan yang mempunyai likuiditas rendah perlu memberikan informasi yang lebih rinci untuk menjelaskan lemahnya kinerja (Ayu Kariza, 2012).

2.1.6.3 Rasio Solvabilitas

Rasio ini disebut juga rasio leverage yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya jika terjadi likuiditasi Bank.

Rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh hutang-hutangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek dengan dana yang berasal dari dana bank sendiri. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan seluruh hutang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan.

2.1.7 Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

2.1.7.1 Pengungkapan

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan.

Secara umum, pengungkapan adalah informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keadaan perusahaan. Didalam pengungkapan semua informasi harus diungkapkan termasuk informasi kuantitatif (seperti komponen persediaan dalam nilai mata uang), dan komponen kualitatif (seperti tuntutan hukum) ,bahkan menurut SEC setiap kejadian yang terjadi dengan tiba-tiba yang dapat mempengaruhi posisi keuangan harus diungkapkan secara khusus (GAAP,1998:42) untuk membantu para pengguna laporan tahunan.

Masalah teoritis pengungkapan dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan berikut ini : (1) Untuk siapa informasi diungkapkan, (2) Mengapa pengungkapan harus dilakukan, (3) Seberapa banyak dan informasi apa yang harus diungkapkan, (4) Bagaimana cara dan kapan mengungkapkan informasi. Terdapat dua macam tipe pengungkapan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan :

- Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan bagian-bagian dalam laporan keuangan yang diwajibkan oleh Bapepam dan LK melalui Keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-38/PM/1996 yang kemudian direvisi dalam Peraturan

Bapepam No. KEP-134/NL/2006 tanggal 7 Desember 2006 dan Ikatan Akuntansi Indonesia

- Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan public sebagaimana tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan.

2.1.7.2 *Islamic Social Reporting (ISR)*

Pada dasarnya, CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan juga tanggung jawab perusahaan terhadap para pemegang saham (*shareholders*). Sebenarnya hingga pada saat ini pengertian mengenai CSR masih beraneka ragam dan memiliki perbedaan defenisi antara satu dengan yang lainnya. Secara global bahwa CSR adalah suatu komitmen perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Kewajiban pengungkapan CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyarankan perusahaan agar mengungkapkan tanggung jawab mengenai sosial dan lingkungan

sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1 (Revisi 1998) Paragraf kesembilan:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (added value statement), khususnya bagi industri dimana faktor faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.”

Di Indonesia, Peraturan BAPEPAM-LK Nomor X.K.6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa salah satu isi dari laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuang tahunan terakhir, salah satunya mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, pemerintah juga turut mendukung praktik pengungkapan CSR melalui UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 66 ayat 2 yang menyatakan bahwa salah satu isi dari laporan tahunan wajib memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan pasal dan pasal 74

menjelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya, disebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meskipun pengungkapan CSR di Indonesia bersifat wajib, item-item CSR yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang masih bersifat sukarela (*voluntary*). Ini dikarenakan pengungkapan CSR belum memiliki standar baku yang berlaku umum terkait dengan hal-hal apa saja yang harus diungkapkan di dalamnya sehingga setiap perusahaan juga dapat melakukan pengungkapan CSR yang berbeda-beda.

Adanya perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang cukup pesat, maka pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) khususnya untuk perbankan syariah. Regulasi tersebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, pada bab II pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pada pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selanjutnya ayat (2) dijelaskan bahwa bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS)

dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Kemudian ayat (3) disebutkan bahwa bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Menurut Haniffa (2002) dalam Khoirudin (2013) menyatakan bahwa selama ini pengukuran CSR disclosure pada perbankan syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiative* Index (GRI) yang hanya mengacu pada pelaporan sosial yang dilakukan oleh lembaga konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting*. Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, saat ini, marak diperbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting* Index (selanjutnya disebut indeks ISR).

Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item

CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Othman et al, 2009).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Sampel/Populasi	Kesimpulan
Othman (2009)	Determinants of <i>Islamic Social Reporting</i> Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia	Top perusahaan syariah yang tercantum dalam bursa Malaysia	Hasil dari penelitian ini adalah : ukuran perusahaan, profitabilitas, komposisi dewan pengurus berpengaruh signifikan terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> , sedangkan tipe industri tidak berpengaruh terhadap ISR.
Ayu Kariza (2012)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR) pada perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index	Perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index	Variabel likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR, sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Dony Kurniawansyah (2013)	Analisis Hubungan Financial Performance dan Corporate <i>Social responsibility</i>	Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel NPL berpengaruh negatif signifikan dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan variabel CAR dan ROA tidak berpengaruh terhadap CSR.
Ratna Aditya Ningrum (2013)	Pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan institusional, dan ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	Seluruh perbankan syariah yang terdaftar di BEI	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variable kinerja keuangan, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> . Secara parsial, variabel kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> . Sedangkan variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap

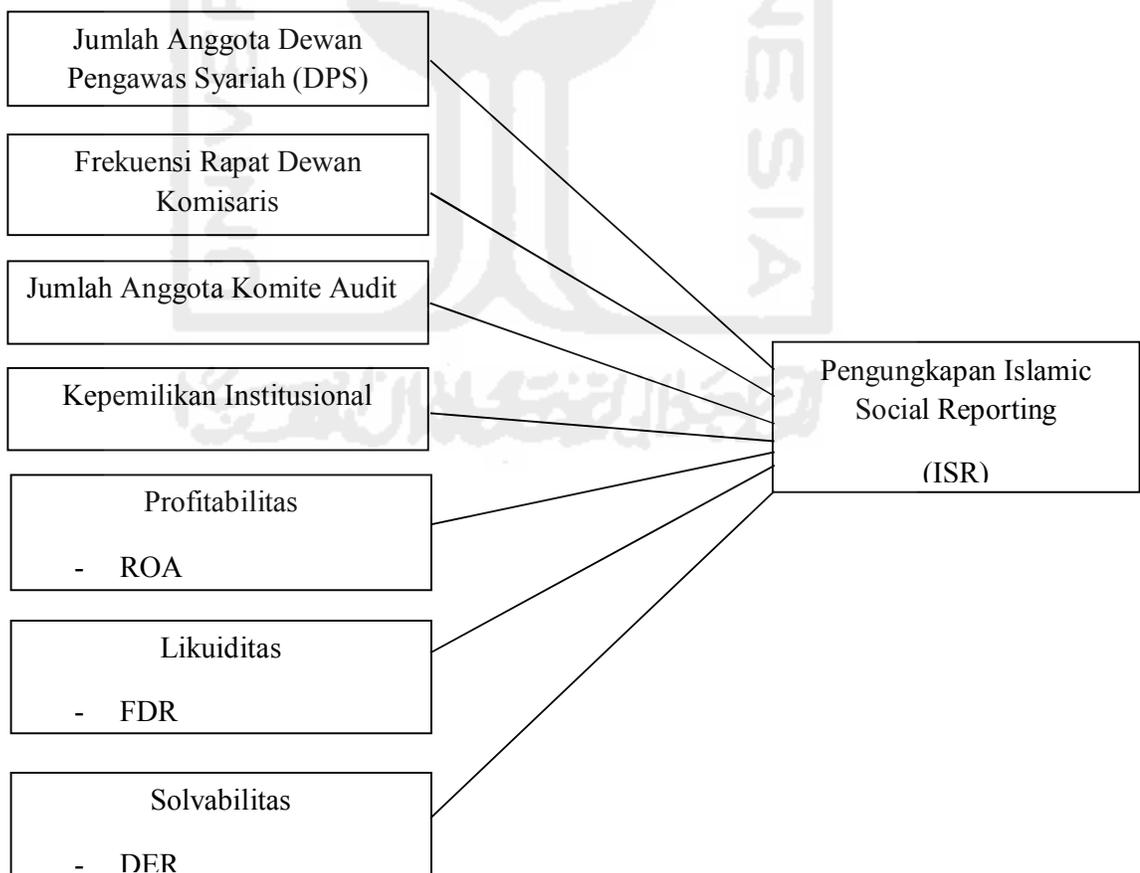
			pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)
Puji Lestari (2013)	Determinants Of <i>Islamic Social Reporting</i> In Syariah Banks: Case Of Indonesia	Seluruh perbankan syariah di Indonesia	Hasil penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR). Sedangkan umur perusahaan dan proportion of independen commissioner tidak berpengaruh terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR).
Nisrina Widayuni (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Corporate <i>Social responsibility</i> (CSR) pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia	Perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia	Hasil dari penelitian yaitu : profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap CSR, sedangkan ukuran, leverage dan jumlah pertemuan Dewan Pengawas Syariah (DPS), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR.
Tri Puji Lestari (2014)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Islamic Social</i>	Seluruh Bank Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia periode 2007-	Hasil dari penelitian ini yaitu : ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR,

	<i>Reporting</i> pada 2012	sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.
	Perbankan Syariah di Indonesia	

2.3 Kerangka Pemikiran

Sebelum melakukan pengembangan hipotesis terlebih dahulu akan disajikan kerangka pemikiran penelitian yang disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS mempunyai peran dalam pengungkapan ISR. Hal ini karena DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, seperti menyalurkan zakat, infaq, sedekah, yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan.

AAOIFI menyatakan bahwa diperlukan setidaknya tiga anggota DPS. Ini merupakan persyaratan umum di banyak bank syariah. Semakin besar jumlah anggota DPS maka semakin besar pemantauan terhadap hukum dan prinsip-prinsip Islam. Dengan jumlah DPS yang memadai maka pelaksanaan dan pengungkapan ISR menjadi lebih terkontrol. Ningrum (2014) menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas berpengaruh terhadap (ISR). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H1 : Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada bank syariah.

2.4.2 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris mengadakan rapat-rapat rutin untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dewan direksi dan implementasinya. Dalam rapat tersebut, akan membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan (FCGI, 2002). Oleh karena itu, semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat diharapkan monitoring (pengawasan) yang dilakukan oleh dewan komisaris akan semakin baik. Dengan demikian, pengungkapan informasi sosial perusahaan juga akan semakin luas. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Xie et al. (2003) dalam Waryanto (2010) yang menemukan bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka fungsi pengawasan semakin efektif sehingga pengungkapan yang dilakukan perusahaan akan semakin luas. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada bank syariah.

2.4.3 Jumlah Anggota Komite Audit

Sembiring (2003) dalam Charles Chariri (2012) menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara ukuran komite audit dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar ukuran komite audit maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin luas. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran komite audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin efektif. Hal ini mengakibatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin luas. Berdasarkan penjelasan di atas, maka :

H3: Jumlah Anggota Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada bank syariah.

2.4.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh suatu institusi dalam perusahaan. Adanya pemegang saham seperti kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin optimal pengawasan perusahaan tersebut. Keberadaan kepemilikan institusional dianggap mampu melakukan pengawasan yang efektif dalam setiap pengambilan keputusan oleh manajer. Ningrum (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap (ISR). Dari penjelasan diatas maka hipotesisnya :

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada bank syariah.

2.4.5 Profitabilitas

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Widiawati (2012), perusahaan dengan profit yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan intervensi kebijakan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut akan terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci dalam laporan tahunan mereka dalam rangka mengurangi biaya politik dan menunjukkan kinerja keuangan kepada publik. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial [Bowman & Haire (1976), Preston (1978) dan Hackston & Milne (1996) dalam Anggraini (2006)]. Pendapat tersebut ditunjukkan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Harto dan Widayuni

(2014) dan Sembiring (2005) yaitu terdapat hubungan positif antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan CSR pada perbankan syariah.

H5: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada bank syariah.

2.4.6 Likuiditas

Van Horn (2009:206) likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio lancar, maka akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar berbagai tagihannya. Oleh karena itu akan berpengaruh juga terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Menurut Wallance dan Naser (1994) berpendapat bahwa likuiditas adalah faktor penting dalam evaluasi perusahaan oleh pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditur dan pemerintah setempat. Dari beberapa pendapat dan peneliti sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dengan perusahaan yang memiliki nilai likuiditas yang tinggi akan semakin besar perusahaan dalam membayar tagihannya, dan akan berpengaruh juga terhadap luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial.

H6: Likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada bank syariah.

2.4.7 Solvabilitas

Meek, Robert, dan Gary (1995) dalam Dewi (2012), berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki tingkat solvabilitas yang tinggi memiliki pengungkapan yang luas dan terbuka sehingga pemberi pinjaman bisa lebih percaya terhadap perusahaan tersebut. Dapat disimpulkan, dimana perusahaan dikatakan baik dengan melihat tingkat leverage perusahaan karena semakin rendah rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham dan semakin besar perlindungan bagi kreditor.

Berdasarkan pendapat para peneliti sebelumnya dalam pengembangan hipotesis pengaruh solvabilitas terhadap pengungkapan ISR, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan solvabilitas yang tinggi perlu memberikan pengungkapan yang lebih luas karena sebelumnya para investor maupun kreditor harus mengetahui seberapa besar kemampuan dalam membayar hutang. Dalam hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Tri Puji Lestari (2014) juga menyebutkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.

H7: Solvabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada bank syariah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2011:80). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dari 12 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia di Indonesia dengan periode tahun 2010-2014.

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu dengan mempertimbangkan kriteria yang sesuai sehingga mendapatkan sampel yang representatif. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut :

- a) Bank Umum Syariah yang membuat serta mempublikasi annual report dan laporan manajerial pada tahun pengamatan yaitu, tahun 2010-2014 secara berturut-turut.

- b) Bank Umum Syariah yang memiliki data lengkap yang berkaitan dengan variable yang digunakan.
- c) Bank Umum Syariah yang mengungkapkan pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia yang digunakan sebagai sampel pada penelitian yaitu :

1. PT Bank Syariah Mandiri (BSM)
2. PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia(BMI)
3. PT. BNI Syariah (BNIS)
4. PT BRI Syariah (BRIS)
5. PT. Bank Syariah Mega Indonesia (BMEGAS)
6. PT Bank Panin Syariah (BPS)
7. PT Bank Syariah Bukopin
8. PT BCA Syariah (BCAS)
9. PT Bank Victoria Syariah

3.2 Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah studi kepustakaan, jurnal, laporan keuangan tahunan perbankan syariah di Indonesia, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan informasi dokumentasi lain yang dapat di ambil melalui sistem on-line (internet).

3.3 Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di BEI dalam periode 2010-2014. Pengambilan data perusahaan berupa annual report yang diperoleh dari website masing-masing perbankan. Data-data yang ada pada annual report perusahaan tersebut akan digunakan untuk menghitung kinerja keuangan berdasarkan Islamicity Performance Index dan mengisi indeks Islamic Social Reporting.

3.4 Definisi dan Pengukuran variabel

Penelitian ini melibatkan tujuh variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen). Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini yaitu *Good*

Corporate Governance (GCG) dan profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas. Adapun *Good Corporate Governance* (GCG) yang menjadi variabel bebas (independen) pada penelitian ini meliputi : jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, frekuensi rapat Dewan Komisaris, jumlah anggota komite audit, dan Kepemilikan Institusional. Sedangkan variable terikat (dependen) dalam penelitian ini yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR).

3.4.1 Variabel Bebas (independen)

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

3.4.1.1 *Good Corporate Governance*

Adapun GCG yang akan diukur dalam penelitian ini terdiri dari empat variable sebagai berikut :

a. Ukuran Dewan Pengawas Syariah (X_1)

Ukuran dewan pengawas syariah merupakan jumlah DPS dalam suatu perusahaan yang diukur dengan menghitung jumlah anggota DPS yang tercantum pada laporan tahunan perusahaan. Berikut rumus untuk menghitung ukuran dewan pengawas syariah :

$$\text{Jumlah DPS} = \sum \text{DPS}$$

b. Frekuensi rapat Dewan Komisaris (X_2)

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang diukur dengan menghitung jumlah rapat dewan komisaris yang tercantum pada laporan tahunan perusahaan. Berikut rumus untuk menghitung ukuran dewan komisaris :

$$\text{Frekuensi Rapat Dewan Komisaris} = \sum \text{Rapat Dewan Komisaris}$$

c. Jumlah Komite Audit (X3)

Ukuran komite audit pada penelitian ini adalah Jumlah komite audit dalam suatu perusahaan yang diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit yang tercantum pada laporan tahunan perusahaan. Berikut rumus untuk menghitung ukuran komite audit :

$$\text{Jumlah Komite Audit} = \sum \text{Komite Audit}$$

d. Kepemilikan Institusional (X4)

Kepemilikan Institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh suatu institusi dalam perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan presentase jumlah saham milik institusi terhadap jumlah saham yang beredar dalam perusahaan. Berikut rumus menghitung kepemilikan institusional dalam perusahaan :

Kpemilikan Institutional

$$= \frac{\text{Jumlah saham milik institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

3.4.1.2 Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan yang diukur dalam penelitian ini menggunakan tiga variable, yaitu :

a. Profitabilitas (X5)

Return On Asset (ROA), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

$$ROA = \frac{\text{Earnings After Interest and Tax}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

b. Likuiditas (X6)

Penilaian kinerja bank syariah sebagai lembaga intermediasi, dapat menggunakan Financing to Deposit Ratio (FDR), yaitu perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank dan

modal bank yang bersangkutan. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut.

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan yang diberikan bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

c. Solvabilitas (X7)

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh hutang-hutangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek dengan dana yang berasal dari dana bank sendiri.

$$DER = \frac{\text{Jumlah Utang}}{\text{Jumlah Modal Sendiri}} \times 100\%$$

3.4.2 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Islamic Social Reporting (ISR)*.

3.4.2.1 *Islamic Social Reporting*

Berikut rumus untuk menghitung besarnya disclosure level setelah scoring pada indeks ISR selesai dilakukan :

$$\text{Disclosure Level} = \frac{\text{Jumlah skor disclosure yang dipenuhi}}{\text{Jumlah skor maksimum}}$$

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data tidak mengalami gangguan sehingga layak untuk diuji. Uji asumsi klasik ini terdiri dari:

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Alat uji yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik normal probability plot dan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S).

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal probability plot adalah (Ghozali, 2011):

- a) Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S) adalah Ghozali (2011):

- a) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- b) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya, (2) Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel

independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, maka dapat diuji dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya SRESID. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2011):

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (periode sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) (Ghozali, 2011). Salah cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya adalah dengan uji Durbin-Watson (D-W test). Uji Durbin Witson banyak digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intersep dalam model regresi dan tidak ada autokorelasi lagi diantara variabel bebas, yang ditunjukkan dengan nilai D-W ada diantara nilai du dan $4-du$.

3.5.2 Uji Hipotesis

3.5.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi berganda digunakan jika variabel independen yang digunakan lebih dari satu.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7$$

Keterangan:

Y = ISR

a = Konstanta (intercept)

$\beta_1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ = Koefisien regresi (slope)

X1 = Jumlah DPS

X2 = Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

X3 = Jumlah Komite Audit

X4 = Kepemilikan Institusional

X5 = Profitabilitas

X6 = Likuiditas

X7 = Solvabilitas

3.5.2.2 Uji t

Menurut Ghozali (2011:98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini digunakan untuk menguji pengaruh asset instrumen keuangan dan ketaatan pengungkapan asset instrumen keuangan terhadap nilai perusahaan dengan reputasi auditor sebagai variabel pemoderat, dengan menentukan derajat kepercayaan sebesar 90% dan tingkat kesalahan α sebesar 10% atau 0.1. Apabila $t_{Stat} > t_{tabel}$ dan $P\text{-value} < 0.1$ maka dapat dikatakan variabel independen berpengaruh signifikan pada variabel dependen.

3.5.2.3 Uji f

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). Uji f dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi f pada output hasil regresi dengan level significant 5%. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), artinya secara simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima. Hal ini berarti

bahwa secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.5.2.4 Uji Adjusted R Squared (Adj.R2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Nilai adjusted R2 merupakan suatu ukuran ikhtisar yang menunjukkan seberapa garis regresi sampel cocok dengan data populasinya. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Rumus untuk menghitung R2 adalah:

$$R^2 = \frac{JK(Reg)}{\sum y^2}$$

Keterangan :

R2 = koefisien determinasi, artinya besarnya pengaruh variabel independen

JK(Reg) = Jumlah kuadrat regresi

$\sum y^2$ = Jumlah kuadrat total dikoreksi

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Deskriptif

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai bank syariah yang *listing* di BEI selama periode penelitian, yakni tahun 2010 – 2014. Adapun kriteria sampel perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan auditan dan yang memiliki kelengkapan data yang diperlukan. Rincian jumlah sampel mengenai perusahaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Rincian Jumlah Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	Jumlah
Bank syariah yang terdaftar berturut-turut tahun 2010 – 2014	12
Tidak tersedia laporan keuangan tahun 2010 – 2014	(3)
Total perusahaan	9
Jumlah data observasi (9 perusahaan × 5 tahun)	45

Sumber : Data sekunder, diolah (2016)

Dari Tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah sampel bank syariah yang terdaftar di BEI selama tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah 9 perusahaan. Tidak semua perusahaan memiliki data secara lengkap (berturut-turut dari tahun ke tahun) selama periode penelitian. Dengan demikian jumlah data sampel penelitian yang memenuhi kriteria untuk digunakan dalam analisis sebanyak 45 sampel. Setelah diperoleh data penelitian selama periode tersebut di atas, maka dilakukan pengolahan data yang meliputi jumlah dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, profitabilitas

(ROA), likuiditas (FDR) dan solvabilitas (DER), serta pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dengan menggunakan rumus yang dipaparkan pada bab sebelumnya.

Data jumlah dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, profitabilitas (ROA), likuiditas (FDR), solvabilitas (DER) dan *Islamic Social Reporting* (ISR) dapat dilihat pada lampiran. Adapun deskripsi data meliputi nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum setiap variabel penelitian dapat dilihat pada statistik deskriptif yang tersaji dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Deviasi	Minimum	Maksimum
<i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	0,62	0,135	0,342	0,875
Jumlah dewan pengawas syariah	2,38	0,490	2	3
Frekuensi rapat dewan komisaris	9,67	9,463	6	36
Jumlah komite audit	3,64	1,246	2	9
Kepemilikan institusional	0,92	0,161	0,419	1
Profitabilitas (ROA)	1,32	1,260	-1,87	6,93
Likuiditas (FDR)	86,62	15,212	16,93	106,7
Solvabilitas (DER)	5,16	4,081	0,0628	11,81

Sumber : Data sekunder, diolah (2016)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel *Islamic Social Reporting* (ISR) mempunyai nilai *mean* sebesar 0,62 dan standar deviasi sebesar 0,135 dengan nilai terendah sebesar 0,342 dan tertinggi sebesar 0,875. Variabel jumlah dewan pengawas syariah mempunyai nilai *mean* sebesar 2,38 dan standar deviasi sebesar 0,490 dengan nilai terendah sebesar 2 dan tertinggi sebesar 3. Variabel frekuensi rapat dewan komisaris mempunyai nilai *mean* sebesar 9,67 dan standar deviasi

sebesar 9,463 dengan nilai terendah sebesar 6 dan tertinggi sebesar 36. Variabel jumlah komite audit mempunyai nilai *mean* sebesar 3,64 dan standar deviasi sebesar 1,246 dengan nilai terendah sebesar 2 dan tertinggi sebesar 9. Variabel kepemilikan institusional mempunyai nilai *mean* sebesar 0,92 dan standar deviasi sebesar 0,161 dengan nilai terendah sebesar 0,419 dan tertinggi sebesar 1. Variabel profitabilitas (ROA) mempunyai nilai *mean* sebesar 1,32 dan standar deviasi sebesar 1,260 dengan nilai terendah sebesar -1,87 dan tertinggi sebesar 6,93. Variabel likuiditas (FDR) mempunyai nilai *mean* sebesar 86,62 dan standar deviasi sebesar 15,212 dengan nilai terendah sebesar 16,93 dan tertinggi sebesar 106,7. Variabel solvabilitas (DER) mempunyai nilai *mean* sebesar 5,16 dan standar deviasi sebesar 4,081 dengan nilai terendah sebesar 0,0628 dan tertinggi sebesar 11,81.

4.2. Analisis Statistik

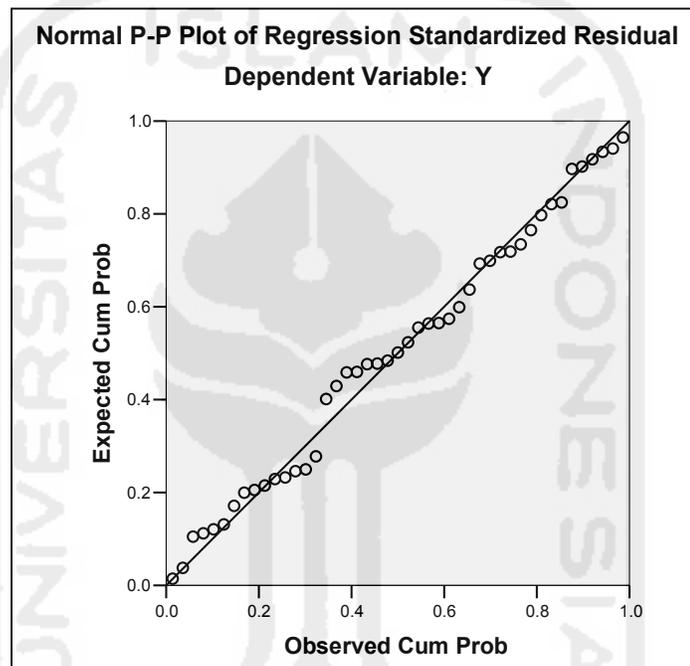
4.2.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, mengingat tidak pada semua data regresi dapat diterapkan. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

4.2.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi mempunyai nilai residual yang

berdistribusi normal atukah tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Hasil grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* dengan program *SPSS 15.0 for Windows* dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Pengujian Normalitas
Sumber : Data sekunder, diolah (2016)

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik yang terbentuk pada grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa model regresi mendekati normal.

4.2.1.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas menyatakan hubungan antar sesama variabel independen. Hasil pengujian multikolinieritas dengan program *SPSS 15.0 for Windows* dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,881	1,135
	X2	,801	1,248
	X3	,732	1,366
	X4	,692	1,445
	X5	,887	1,128
	X6	,691	1,448
	X7	,771	1,297

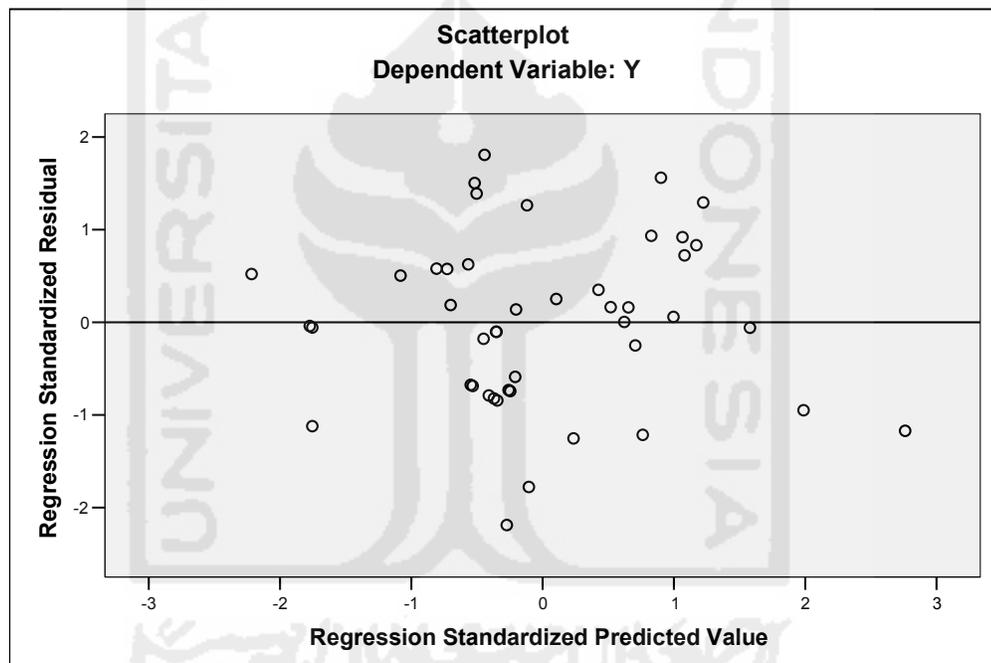
a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data sekunder, diolah (2016)

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa, nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1. Hal ini berarti dalam model regresi tidak terjadi korelasi antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebasnya (independen) lainnya.

4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain terjadi ketidaksamaan. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik *scatterplot*. Hasil grafik *scatterplot* dengan program *SPSS 15.0 for Windows* dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Sumber : Data sekunder, diolah (2016)

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa titik-titik yang terbentuk pada grafik *scatterplot* menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu X dan sumbu Y. Selain itu, titik-titik tersebut tidak

membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (periode sebelumnya). Uji autokorelasi dilakukan dengan menghitung nilai Durbin Watson (DW) statistic berdasarkan kriteria Durbin-Watson.

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,672 ^a	,452	,348	,10895	1,060

a. Predictors: (Constant), X7, X4, X1, X5, X2, X3, X6

b. Dependent Variable: Y

Hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,060. Berdasarkan tabel (DW) dengan jumlah sampel (n) sebesar 45 dan jumlah variabel independen (k) sebesar 7 maka diperoleh nilai d_L (batas bawah) sebesar 1,019 dan d_u (batas atas) sebesar 1,704. Hal ini berarti nilai DW sebesar $1,060 > d_L$, sehingga disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi.

4.2.2. Analisis Data

4.2.2.1 Analisis Regresi Berganda

Untuk menjawab tujuan penelitian yang menyatakan bahwa *good corporate governance* (jumlah dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah komite audit dan kepemilikan institusional), profitabilitas (ROA), likuiditas (FDR), dan solvabilitas (DER) berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dilakukan analisis regresi ganda. Adapun hasil analisis regresi ganda menggunakan SPSS dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Ganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,101	,136		,746	,460
	X1	,111	,036	,405	3,120	,003
	X2	,0027	,002	,190	1,399	,170
	X3	,042	,015	,388	2,731	,010
	X4	,084	,117	,105	,719	,477
	X5	-,013	,014	-,122	-,943	,352
	X6	,001	,001	,083	,565	,575
	X7	-,009	,005	-,271	-1,952	,059

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data sekunder, diolah (2016)

Berdasarkan hasil analisis regresi ganda pada Tabel 4.4 di atas, dapat dilakukan interpretasi sebagai berikut.

$$Y = 0,101 + 0,111X_1 + 0,0027X_2 + 0,042X_3 + 0,084X_4 - 0,013X_5 + 0,001X_6 - 0,009X_7$$

Keterangan:

- Y = *Islamic Social Reporting (ISR)*
- X₁ = Jumlah dewan pengawas syariah
- X₂ = Frekuensi rapat dewan komisaris
- X₃ = Jumlah komite audit
- X₄ = Kepemilikan institusional
- X₅ = Profitabilitas (ROA)
- X₆ = Likuiditas (FDR)
- X₇ = Solvabilitas (DER)

4.2.2.2 Uji signifikan parsial (uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari kelima variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, dengan membandingkan nilai probabilitas (Sig.) dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh pada Tabel 4.4 di atas, maka dilakukan uji signifikansi koefisien regresi secara parsial sebagai berikut:

- (a) Nilai koefisien variabel jumlah dewan pengawas syariah diketahui sebesar 0,111 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,003. Oleh karena, nilai probabilitas (Sig.) sebesar $0,003 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah secara parsial berpengaruh signifikan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
- (b) Nilai koefisien variabel frekuensi rapat dewan komisaris diketahui sebesar 0,0027 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,170. Oleh karena, nilai probabilitas (Sig.) sebesar $0,170 > 0,05$ maka disimpulkan bahwa pengaruh parsial frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) tidak signifikan.
- (c) Nilai koefisien variabel jumlah komite audit diketahui sebesar 0,042 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,010. Oleh karena, nilai probabilitas (Sig.) sebesar $0,010 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa jumlah komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
- (d) Nilai koefisien variabel kepemilikan institusional diketahui sebesar 0,084 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,477. Oleh karena, nilai probabilitas (Sig.) sebesar $0,477 > 0,05$ maka disimpulkan bahwa pengaruh parsial kepemilikan

institusional terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) tidak signifikan.

(e) Nilai koefisien variabel profitabilitas (ROA) diketahui sebesar -0,013 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,352.

Oleh karena, nilai probabilitas (Sig.) sebesar $0,352 > 0,05$ maka disimpulkan bahwa pengaruh parsial profitabilitas (ROA) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) tidak signifikan.

(f) Nilai koefisien variabel likuiditas (FDR) diketahui sebesar 0,001 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,575. Oleh karena, nilai probabilitas (Sig.) sebesar $0,575 > 0,05$ maka disimpulkan bahwa pengaruh parsial likuiditas (FDR) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) tidak signifikan.

(g) Nilai koefisien variabel solvabilitas (DER) diketahui sebesar -0,009 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,059. Oleh karena, nilai probabilitas (Sig.) sebesar $0,059 > 0,05$ maka disimpulkan bahwa pengaruh parsial solvabilitas (DER) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) tidak signifikan.

4.2.2.3 Uji signifikan parsial (uji f)

Uji F ini dilakukan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan mampu menerangkan variasi independen atau pengaruh kelima variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (Sig.) dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh hasil uji F sebagai berikut.

Tabel 4.6 Hasil Uji F (F test)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,362	7	,052	4,357	,001 ^a
	Residual	,439	37	,012		
	Total	,801	44			

a. Predictors: (Constant), X7, X4, X1, X5, X2, X3, X6
b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data sekunder, diolah (2016)

Berdasarkan analisis regresi pada Tabel 4.5 diperoleh hasil F statistik sebesar 4,357 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,001. Oleh karena nilai probabilitas (Sig.) sebesar $0,001 < 0,05$ maka dapat diartikan bahwa jumlah dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, profitabilitas (ROA), likuiditas (FDR), solvabilitas

(DER) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Dengan kata lain, variasi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dapat diterangkan oleh jumlah dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, profitabilitas (ROA), likuiditas (FDR), solvabilitas (DER) dalam model regresi.

4.2.2.4 Koefisien Determinasi ganda (adjusted R²)

Untuk mengukur sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi ganda (*Adjusted R²*). Jika *Adjusted R²* yang diperoleh dari hasil perhitungan semakin besar (mendekati 1), maka sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar. Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh hasil koefisien determinasi ganda (*Adjusted R²*) sebagai berikut.

Tabel 4.7. Hasil Koefisien Determinasi Ganda (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,672 ^a	,452	,348	,10895	1,060

a. Predictors: (Constant), X7, X4, X1, X5, X2, X3, X6
 b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data sekunder, diolah (2016)

Dari hasil analisis regresi ganda pada Tabel 4.6 dapat diketahui besarnya nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,348. Hal ini menunjukkan bahwa 34,8% pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dipengaruhi oleh jumlah dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, profitabilitas (ROA), likuiditas (FDR) dan solvabilitas (DER), sedangkan 65,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Nilai *Adjusted R²* yang rendah (mendekati nol), menunjukkan bahwa sumbangan variabel terikat semakin kecil. Artinya, kemampuan jumlah dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, profitabilitas (ROA), likuiditas (FDR), solvabilitas (DER) dalam memprediksi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) bank syariah selama periode pengamatan 2010 - 2014 yang rendah.

4.3. Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan model regresi berganda di atas dapat dilakukan uji hipotesis sebagai berikut.

a. Hipotesis 1

Hipotesis 1 menyatakan bahwa adanya jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil uji regresi ganda menunjukkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sehingga hipotesis penelitian 1 didukung. Artinya, meningkatnya jumlah dewan pengawas syariah diikuti oleh meningkatnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

b. Hipotesis 2

Hipotesis 2 menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil uji regresi ganda menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sehingga hipotesis penelitian 2 tidak didukung. Artinya, semakin meningkatnya frekuensi rapat dewan komisaris tidak diikuti oleh meningkatnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

c. Hipotesis 3

Hipotesis 3 menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil uji regresi ganda menunjukkan bahwa jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sehingga hipotesis penelitian 3

didukung. Artinya, semakin meningkatnya jumlah komite audit diikuti oleh meningkatnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

d. Hipotesis 4

Hipotesis 4 menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil analisis regresi ganda menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sehingga hipotesis penelitian 4 tidak didukung. Artinya, meningkatnya kepemilikan institusional tidak diikuti oleh meningkatnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

e. Hipotesis 5

Hipotesis 5 menyatakan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil analisis regresi ganda menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sehingga hipotesis penelitian 5 tidak didukung. Artinya, meningkatnya profitabilitas (ROA) tidak diikuti oleh meningkatnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

f. Hipotesis 6

Hipotesis 6 menyatakan bahwa likuiditas (FDR) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil analisis regresi ganda menunjukkan bahwa likuiditas (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sehingga hipotesis penelitian 6

tidak didukung. Artinya, meningkatnya likuiditas (FDR) tidak diikuti oleh meningkatnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

g. Hipotesis 7

Hipotesis 7 menyatakan bahwa solvabilitas (DER) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil analisis regresi ganda menunjukkan bahwa solvabilitas (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sehingga hipotesis penelitian 7 tidak didukung. Artinya, meningkatnya solvabilitas (DER) tidak diikuti oleh meningkatnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

4.4. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* (jumlah dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah komite audit dan kepemilikan institusional), profitabilitas (ROA), likuiditas (FDR), dan solvabilitas (DER) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dengan studi empiris pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Hasil analisis regresi ganda menunjukkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah dan jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris, kepemilikan institusional, profitabilitas (ROA), likuiditas

(FDR), dan solvabilitas (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

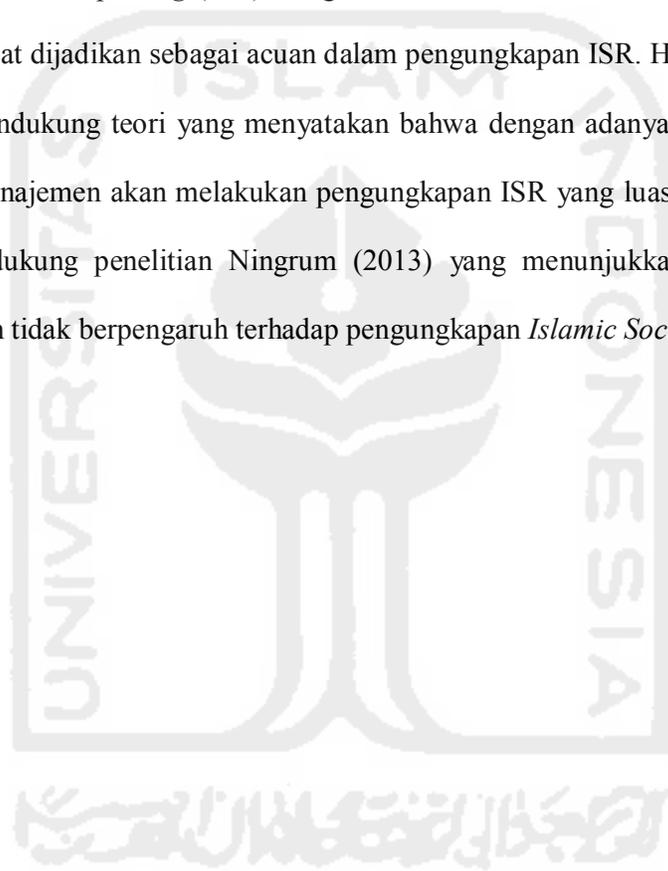
Jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah, maka semakin efektif pengawasan terhadap prinsip syariah dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Faozan (2013) yang menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berperan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah meliputi mengontrol, menilai, dan mensupervisi aktivitas pada lembaga keuangan syariah untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip dan aturan syariah.

Jumlah komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran komite audit, semakin efektif pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sehingga pengungkapan *Islamic Social Reporting* semakin tinggi. Hasil penelitian ini menegaskan fungsi komite audit sebagai salah satu mekanisme pengendali dalam penyusunan laporan keuangan yang memberikan pengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance* yang meliputi frekuensi rapat dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hal ini diduga karena Dewan Komisaris sebagai wakil *shareholders* maka Dewan

Komisaris membuat kebijakan menggunakan laba perusahaan untuk aktivitas yang lebih menguntungkan daripada untuk aktivitas sosial.

Variabel kinerja keuangan yang meliputi profitabilitas (ROA), likuiditas (FDR), dan solvabilitas (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) mengindikasikan bahwa variabel kinerja keuangan tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori yang menyatakan bahwa dengan adanya laba yang tinggi maka manajemen akan melakukan pengungkapan ISR yang luas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ningrum (2013) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data mengenai pengaruh *good corporate governance* (jumlah dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah komite audit dan kepemilikan institusional), profitabilitas (ROA), likuiditas (FDR), solvabilitas (DER) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dengan studi empiris pada bank syariah periode 2010 sampai dengan 2014, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Artinya, meningkatnya jumlah dewan pengawas syariah diikuti oleh meningkatnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sehingga hipotesis 1 yang menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) didukung.
2. Frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Artinya, semakin meningkatnya frekuensi rapat dewan komisaris tidak diikuti oleh meningkatnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sehingga hipotesis 2 yang menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris

berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) tidak didukung.

3. Jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Artinya, semakin meningkatnya jumlah komite audit diikuti oleh meningkatnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sehingga hipotesis 3 yang menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) didukung.
4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Artinya, meningkatnya kepemilikan institusional tidak diikuti oleh meningkatnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sehingga hipotesis 4 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) tidak didukung.
5. Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Artinya, meningkatnya profitabilitas (ROA) tidak diikuti oleh meningkatnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sehingga hipotesis 5 yang menyatakan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) tidak didukung.
6. Likuiditas (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Artinya, meningkatnya likuiditas (FDR) tidak

diikuti oleh meningkatnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sehingga hipotesis 6 yang menyatakan bahwa likuiditas (FDR) berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) tidak didukung.

7. Solvabilitas (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Artinya, meningkatnya solvabilitas (DER) tidak diikuti oleh meningkatnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sehingga hipotesis 7 yang menyatakan bahwa solvabilitas (DER) berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) tidak didukung.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka penulis menyarankan kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan *good corporate governance*, khususnya jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), maka bagi pihak investor disarankan untuk dijadikan kedua variabel ini sebagai acuan untuk menentukan strategi mereka dalam berinvestasi.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mungkin belum dapat sepenuhnya memiliki pengaruh terhadap pengungkapan

Islamic Social Reporting (ISR) dalam suatu perbankan syariah, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

3. Terdapat unsur subjektivitas dalam mengukur pengungkapan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), maka penelitian selanjutnya diharapkan lebih teliti lagi dalam menganalisis pokok-pokok pengungkapan yang terdapat dalam laporan tahunan.
4. Penelitian selanjutnya bisa memperluas jumlah sampel dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) seperti *Indonesia Sharia Stock Indeks* (ISSI) dan *Jakarta Islamic Indeks* (JII).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahzar, F. A. (2013). Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Syariah di Indonesia. *Dalam Proceeding Seminar Indonesia dan Call for Papers Sancall 2013*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arbi, S. (2013). *Lembaga : Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Assegaf, Y. U. (2012). Bank Syariah di Indonesia : Corporate Governance dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Islam (Islamic Social Reporting Disclosure). *Jurnal Akuntansi*, 255-267.
- Astuti, T. P. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Syariah di Indonesia. *Naskah Publikasi*, 1-10.
- Bastian, I. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VII, No.1 : pp.1-14.
- Fitria, S., & Hartanti, D. (2010). Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Global Reporting Initiative dan Islamic Social Reporting dan ISR. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*, 1-46.
- Ghazali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gitosudarmo, I., & Bastri. (2002). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Hadi, N. (2011). *Corporate Social Reporting*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Haniffa, R. (2002). Social Reporting Disclosure : An Islamic Perspective. *Indonesia Management and Accounting Research*, Vol 1, No.2, pp: 128-146.
- Ikhsan, A. (2008). *Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jannah, A. M. (2016). Pengaruh GCG, Size, Jenis Produk dan Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Akuntansi*, 1-9.
- Khoirudin, A. (2013). Corporate Governance dan pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 1-6.
- Lestari, P. (2013). "Determinants of Islamic Social Reporting in Syariah Banks Case of Indonesian". *International Journal of Business and Management Invention*, Vol.2, Issue.10: pp. 28-34.
- Lestari, S. (2014). Pengaruh Tingkat Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Islamic Social Reporting. *Jurnal Akuntansi*, 17-23.
- Muhammad, R. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Mulyono, S. (2006). *Statistik untuk Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UII.

- Ningrum, R. A. (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Akuntansi*, 1-9.
- Putra, H. F. (2012). Analisis Pelaksanaan dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan Indeks Islamic Social Reporting. 1-12.
- R.D, I. G. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Naskah Publikasi*, 1-18.
- Rina Trisnawati. (2012). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Manajemen terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi*, 370-385.
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik: Fascho Publishing.
- Widayuni, N., & Harto, P. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.3, No.2 : pp 1-11.
- Widiawati, S., & Raharja, S. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-Perusahaan yang terdapat pada DES tahun 2009-2011. *Journal of Accounting*, 1-15.

www.syariahmandiri.co.id, diakses pada 13 Agustus 2016

www.muamalatbank.com, diakses pada 13 Agustus 2016

www.bnisyariah.co.id, diakses pada 13 Agustus 2016

www.brisyariah.co.id, diakses pada 25 Agustus 2016

www.syariahbukopin, diakses pada 25 Agustus 2016

www.bcasyariah.co.id, diakses pada 26 Agustus 2016

www.megasyariah.co.id, diakses pada 26 Agustus 2016

www.paninbanksyariah.co.id, diakses pada 31 Agustus 2016

www.btpnsyariah.com, diakses pada 31 Agustus 2016

www.maybanksyariah.co.id, diakses pada 31 Agustus 2016

www.bankvictoriasyariah.co.id, diakses pada 2 September 2016

www.bjbsyariah.co.id, diakses pada 2 September 2016



Lampiran 1

Daftar Indeks *Islamic Social Reporting*

	45 item ISR yang dihitung pengungkapannya
No	Kemungkinan Informasi penting untuk diungkapkan
	I Tanggung jawab DPS (Dewan Pengawas Syariah)
1	Nama anggota DPS dan kualifikasinya
2	Ruang lingkup pekerjaan dan penyesuaian terhadap ketentuan hukum
3	Review/lingkup pemeriksaan
4	Opini terhadap hasil pemeriksaan
5	Rekomendasi untuk perbaikan
6	Tanda tangan anggota DPS
7	Gaji/Remunerasi DPS
	II Informasi Produk dan Jasa
8	Informasi mengenai produk dan jasa baru
9	Persetujuan produk baru dari DPS
10	Daftar/definisi produk yang ditawarkan
11	Informasi umum kegiatan investasi
12	Informasi umum dari kegiatan pembiayaan
	III Pengelolaan Zakat
13	Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat
14	Saldo dana zakat dan alasan belum didistribusikannya
15	Pengesahan mengenai perhitungan dan distribusi dana zakat
	IV Pinjaman <i>Qardh al-Hasan</i>
16	Kebijakan bank dalam memberikan pinjaman <i>Qardh</i>
17	Sumber dana yang dialokasikan untuk <i>Qardh</i>
18	Jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat
	V Kegiatan Amal dan Sosial
19	Sifat kegiatan amal dan social
20	Jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan ini
21	Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini
	VI Transaksi yang melanggar hukum (Haram)
22	Alasan untuk menjalankan transaksi tersebut
23	Jumlah pendapatan atau beban dari transaksi ini

24	Kebijakan bank untuk menerima dan menyalurkan dana non-halal
VII	Tanggung Jawab kepada Karyawan
25	Kebijakan gaji, pemberian upah dan kesejahteraan lainnya
26	Kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan
27	Kebijakan kesempatan yang sama diantara karyawan
28	Kebijakan di lingkungan kerja
29	Kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan
30	Apresiasi terhadap karyawan
31	Penghargaan karyawan (bonus, dll)
VIII	Tanggung Jawab kepada Masyarakat
32	Menciptakan kesempatan kerja
33	Dukungan untuk organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat
34	Mensponsori kegiatan masyarakat
35	Pernyataan komitmen untuk peran sosial
36	Partisipasi pada konferensi/seminar tentang ekonomi syariah, perbankan dan keuangan
37	Magang untuk mahasiswa
IX	Aspek Pengembangan Komunitas masyarakat
38	Peran bank pada perkembangan ekonomi
39	Peran bank dalam menangani masalah sosial
40	Peran bank dalam menangani pengembangan pendidikan dan sponsor
41	Peran bank dan komitmen untuk memberikan pembiayaan bagi sektor ekonomi mikro dan kecil
X	Keterlambatan pembayaran oleh klien dan masalah klien
42	Kebijakan dalam menangani klien yang memiliki masalah
43	Jumlah yang dibebankan sebagai penalti/denda, jika ada
44	Opini syariah mengenai diperbolehkannya membebaskan biaya tambahan (seperti penalti/denda)
45	Pengakuan pembayaran penalti/denda sebagai sumber pendapatan lain

Lampiran 2

Populasi dan Sampel Penelitian

No	Bank Umum Syariah	Kriteria Sampel	
		1	2
1	Bank Syariah Mandiri	√	√
2	Bank Muamalat Indonesia	√	√
3	BNI Syariah	√	√
4	BRI Syariah	√	√
5	Bank Mega Syariah	√	√
6	Bank Jabar Banten Syariah	√	-
7	Panin Bank Syariah	√	√
8	Bank Syariah Bukopin	√	√
9	Bank Victoria Syariah	√	√
10	BCA Syariah	√	√
11	Maybank Syariah	√	-
12	BTPN Syariah	√	-

Sampel Penelitian

No	Bank Umum Syariah
1	Bank Syariah Mandiri
2	Bank Muamalat Indonesia
3	BNI Syariah
4	BRI Syariah
5	Bank Mega Syariah
6	Panin Bank Syariah
7	Bank Syariah Bukopin
8	BCA Syariah
9	Bank Victoria Syariah

Lampiran 3

Hasil Checklist Indeks *Islamic Social Reporting*

Item ISR	Bank Syariah Mandiri					Bank Muamalat Indonesia					BNI Syariah					BRI Syariah					Bank Mega Syariah				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
I																									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
3	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
5	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
II																									
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0
9	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1
10	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1
11	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
12	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
III																									
13	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1
14	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1
15	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
IV																									
16	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1

17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
18	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
V																									
19	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0
20	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
VI																									
22	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
23	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0
VII																									
25	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
26	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0
27	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
28	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0
29	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
30	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
31	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1
VIII																									
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
33	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
34	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
35	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1
36	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1
37	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1

IX																									
38	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1
40	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1
41	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
X																									
42	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0
43	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
44	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1
45	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
Total	32	36	34	37	39	30	37	36	32	39	31	29	33	35	28	32	24	30	32	34	23	23	23	25	34
Skor ISR	0,72	0,8	0,76	0,82	0,88	0,66	0,82	0,8	0,7	0,88	0,68	0,64	0,74	0,78	0,61	0,7	0,54	0,66	0,7	0,75	0,52	0,52	0,5	0,56	0,75



Lampiran 4
Data Input Excel

No.	Variabel	Tahun	Ukuran Dewan Pengawas Syariah (X1)	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (X2)	Ukuran Komite Audit (X3)	Kepemilikan Institusional (X4)	Profitabilitas (X5)	Likuiditas (X6)	Solvabilitas (X7)	Islamic Social Reporting (Y)
1	Bank Syariah Mandiri	2010	3	6	4	1,0	2,21	82,54	2,479	0,720
2		2011	3	6	4	1,0	1,95	86,03	2,291	0,800
3		2012	3	6	5	1,0	2,25	94,4	2,193	0,760
4		2013	3	6	4	1,0	1,53	89,37	2,269	0,820
5		2014	3	6	3	1,0	0,17	82,13	1,687	0,875
6	Bank Muamalat Indonesia	2010	3	6	3	0,9	1,36	91,52	1,764	0,660
7		2011	3	6	4	0,9	1,52	85,18	2,067	0,820
8		2012	3	6	4	0,7	1,54	94,15	3,302	0,800
9		2013	3	6	3	0,9	1,37	99,99	2,974	0,700
10		2014	3	6	4	0,9	0,17	84,14	2,352	0,875
11	BNI Syariah	2010	2	6	7	1,0	2,5	70,15	6,499	0,680
12		2011	2	6	4	1,0	1,29	78,6	6,903	0,640
13		2012	2	6	4	1,0	1,48	84,99	6,658	0,740
14		2013	2	6	4	1,0	1,37	97,86	7,109	0,780
15		2014	2	6	3	1,0	1,27	92,58	5,827	0,613

16	BRI Syariah	2010	3	36	4	1,0	0,35	95,82	5,339	0,700
17		2011	2	36	3	1,0	0,2	90,55	10,248	0,540
18		2012	2	36	4	1,0	1,19	100,96	11,182	0,660
19		2013	2	36	4	1,0	1,15	102,7	8,124	0,700
20		2014	2	36	3	1,0	0,08	93,9	9,785	0,750
21	Bank Mega Syariah	2010	3	6	3	1,0	1,9	78,17	10,604	0,520
22		2011	3	6	3	1,0	1,58	83,08	11,340	0,520
23		2012	3	6	3	1,0	3,81	88,88	11,465	0,500
24		2013	3	6	5	1,0	2,33	93,37	10,266	0,560
25		2014	3	6	9	1,0	0,29	93,61	11,807	0,746
26	Bank Panin Syariah	2010	2	9	3	1,0	0,79	69,76	0,142	0,360
27		2011	2	9	3	1,0	1,75	106,7	0,063	0,420
28		2012	2	9	3	1,0	3,29	105,66	0,426	0,500
29		2013	2	9	3	1,0	1,03	90,4	0,765	0,620
30		2014	2	9	3	0,8	1,99	94,04	0,831	0,729
31	Bank Syariah Bukopin	2010	3	6	3	0,4	0,74	99,15	11,297	0,500
32		2011	2	6	3	1,0	0,52	83,54	8,960	0,580
33		2012	2	6	4	1,0	0,55	91,98	10,440	0,580
34		2013	2	6	4	1,0	0,69	100,29	11,183	0,620
35		2014	2	6	6	1,0	0,27	92,89	7,969	0,688
36	BCA Syariah	2010	2	6	3	1,0	1,42	77,9	0,368	0,500
37		2011	2	6	3	1,0	0,9	78,84	0,547	0,500
38		2012	2	6	3	1,0	0,8	79,91	0,844	0,580
39		2013	2	6	3	1,0	1	83,48	0,877	0,580
40		2014	2	6	4	1,0	0,8	91,17	0,518	0,508

41	Bank Victoria Syariah	2010	2	6	2	0,5	1,09	16,93	0,261	0,458
42		2011	2	6	3	0,5	6,93	46,08	3,326	0,479
43		2012	2	6	2	0,5	1,43	73,78	4,237	0,458
44		2013	2	6	2	0,5	0,5	84,65	6,487	0,342
45		2014	2	6	3	0,9	-1,87	95,91	6,109	0,563



Lampiran 5

Data Output SPSS

Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

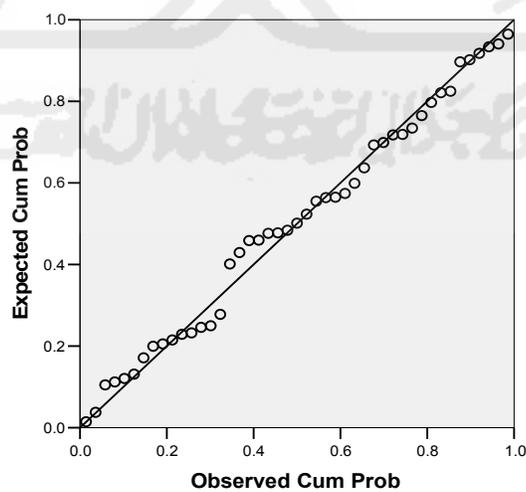
	Mean	Std. Deviation	N
Y	,6232	,13494	45
X1	2,3778	,49031	45
X2	9,6667	9,46285	45
X3	3,6444	1,24600	45
X4	,9200	,16868	45
X5	1,3218	1,26029	45
X6	86,6162	15,21207	45
X7	5,1596	4,08096	45

Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Y

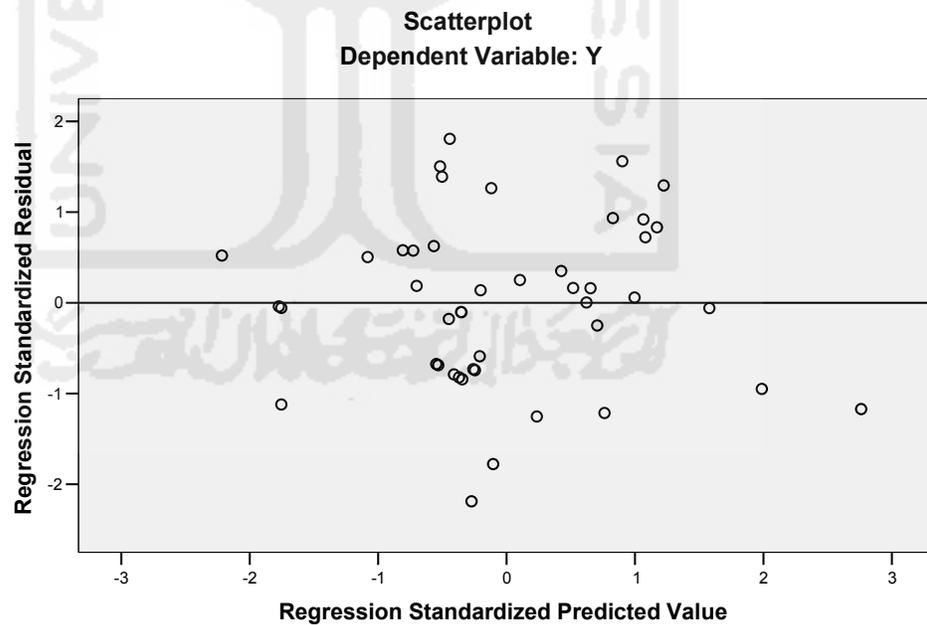


- Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,881	1,135
	X2	,801	1,248
	X3	,732	1,366
	X4	,692	1,445
	X5	,887	1,128
	X6	,691	1,448
	X7	,771	1,297

a. Dependent Variable: Y

- Uji Heteroskedastisitas



- Uji Autokorelasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,672 ^a	,452	,348	,10895	1,060

a. Predictors: (Constant), X7, X4, X1, X5, X2, X3, X6

b. Dependent Variable: Y

Uji Hipotesis

- Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,101	,136		,746	,460		
	X1	,111	,036	,405	3,120	,003	,881	1,135
	X2	,0027	,002	,190	1,399	,170	,801	1,248
	X3	,042	,015	,388	2,731	,010	,732	1,366
	X4	,084	,117	,105	,719	,477	,692	1,445
	X5	-,013	,014	-,122	-,943	,352	,887	1,128
	X6	,001	,001	,083	,565	,575	,691	1,448
	X7	-,009	,005	-,271	-1,952	,059	,771	1,297

a. Dependent Variable: Y

- Uji f

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,362	7	,052	4,357	,001 ^a
	Residual	,439	37	,012		
	Total	,801	44			

a. Predictors: (Constant), X7, X4, X1, X5, X2, X3, X6

b. Dependent Variable: Y

- Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,672 ^a	,452	,348	,10895	1,060

a. Predictors: (Constant), X7, X4, X1, X5, X2, X3, X6

b. Dependent Variable: Y